



**PENYUSUNAN
RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH (RPIJM)
BIDANG CIPTA KARYA KABUPATEN/KOTA**

1 | Urgensi Review RPIJM Kabupaten/Kota

Mengapa perlu diperbaharui?

- Pemutakhiran Amanat Pembangunan Bidang Cipta Karya

RPJMN TAHAP III 2015 – 2019 BIDANG INFRASTRUKTUR

- Ketersediaan infrastruktur sesuai tata ruang;
- Berkembangnya jaringan transportasi;
- Terwujudnya konservasi sumber daya air dan terpenuhinya penyediaan air minum untuk kebutuhan dasar pengembangan infrastruktur perdesaan mendukung pertanian;
- Pemenuhan kebutuhan hunian didukung sistem pembiayaan jangka panjang;
- Terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh.



NAWACITA PEMERINTAH 2015–2019

- 3** Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
- 5** Meningkatkan kualitas hidup manusia.

1

Urgensi Review RPIJM Kabupaten/Kota

Mengapa perlu diperbaharui?

- Penyesuaian Sasaran Strategis → Isu-isu Strategis Bidang Cipta Karya

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Goal 6

Menjamin ketersediaan dan pengelolaan berkelanjutan air dan sanitasi bagi semua

Goal 11

Mewujudkan perkotaan dan kawasan permukiman yang inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan

- Akses Perumahan Layak Bagi Semua, Aman Dan Terjangkau;

- **AKSES LAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR;**

- **LAYANAN RUANG PUBLIK YANG MEMADAI;**

- Pengelolaan Urbanisasi Sebagai Bagian Dari Perencanaan Permukiman Perkotaan.

PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)

Penyelenggaraan infrastruktur permukiman yang pada tahap siklus pembangunannya (perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi) memperhatikan analisis sosial (kebutuhan, hambatan, dan aspirasi) terhadap kelompok gender (laki-laki, perempuan, anak-anak, lansia, difabel, kelompok rentan lainnya) agar secara setara dan adil

MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (MAPI)

Kenaikan suhu permukaan meningkat dengan pasti melebihi perkiraan sebelumnya antara 1,5° C – 4° C (IPCC,2013)

Worst Scenario untuk kenaikan muka air laut yang terus meningkat dari perkiraan sebelumnya antara 18-59 cm pada tahun 2010 (IPCC, 2013)

1 | Urgensi Penyusunan RPIJM Kabupaten/Kota

Mengapa perlu diperbaharui?

- Penyesuaian Sasaran Strategis → Target 100-0-100

MASALAH CIPTA KARYA



PROGRAM PERMUKIMAN BERKELANJUTAN 100-0-100

STRATEGI PELAKSANAAN

- Prioritas program untuk mewujudkan KSN dan pencapaian SPM bidang Cipta Karya di daerah
- Sinergi pembangunan lintas sektoral/entitas kewilayahan (lingkungan, kawasan, kota, dan regional)
- Berkelanjutan dengan berbasis kualitas respon daerah (insentif)
- Hasil kegiatan yang berkualitas menjadi referensi program Cipta Karya oleh daerah

SINERGI KEMITRAAN

- Ditjen Perumahan KPUPR : perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH)
- Kementerian Kesehatan : perubahan perilaku hidup sehat.
- Kementerian Dalam Negeri : pengembangan kapasitas Pemda
- Kementerian LH - Kehutanan : pengelolaan persampahan
- Kementerian Kelautan Perikanan : lokasi kawasan nelayan
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang: RTRW dan RDTR
- Kemitraan dengan Pemerintah Daerah
- Kemitraan Habitat dan masyarakat

SASARAN 2015 - 2019

100% akses air minum

Terpenuhinya penyediaan **Air Minum** untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat

0% luas kawasan kumuh perkotaan

100% Perda BG

TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
• Berkualitas • Produktif
• Layak Huni • Berjati Diri

Pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung, menuju **Kota Tanpa Kumuh**

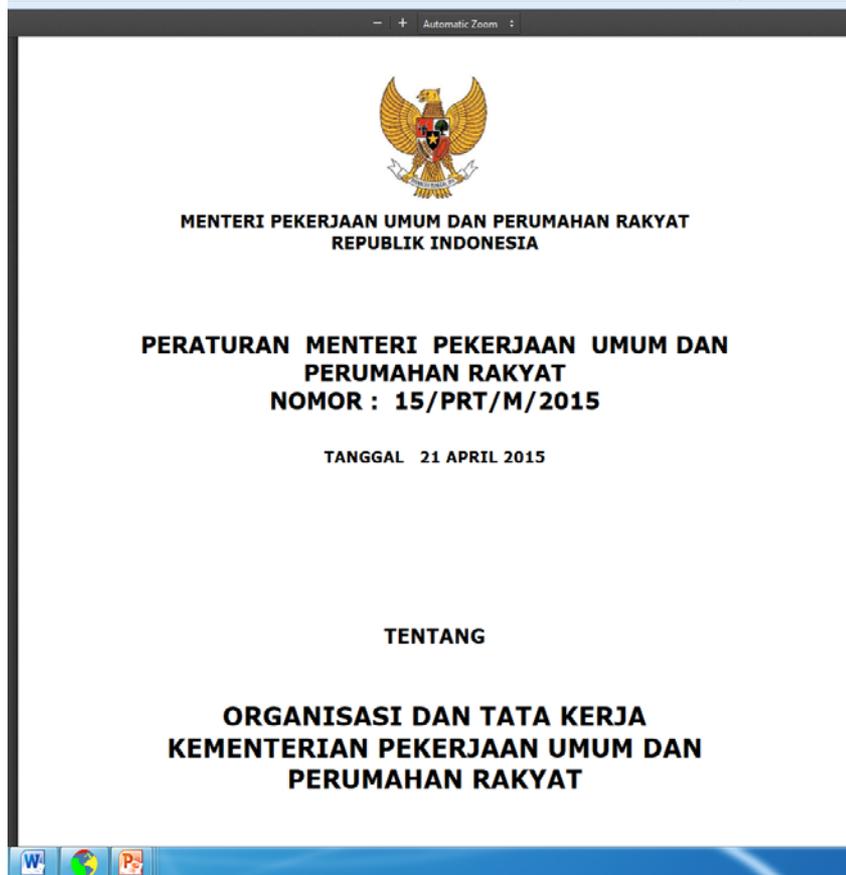
100% akses sanitasi

Terpenuhinya penyediaan **Sanitasi** untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (persampahan, limbah, dan drainase lingkungan)

1 | Urgensi Penyusunan RPIJM Kabupaten/Kota

Mengapa perlu diperbaharui?

- Perubahan Nomenklatur Bidang Cipta Karya



2

Definisi

RPIJM

Dokumen perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, dan dunia usaha dengan mengacu pada rencana pembangunan, rencana tata ruang dan rencana Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).

Mengapa perlu diperbaharui?

- Pemutakhiran Amanat Pembangunan Bidang Cipta Karya
- Penyesuaian Sasaran Strategis
- Perubahan Nomenklatur Bidang Cipta Karya

3

Outline RPIJM

OUTLINE LAMA

Bab 1. Pendahuluan

Bab 2. Arahana Perencanaan Pembangunan Bidang Cipta Karya

Bab 3. Arahana Strategis Nasional Bidang Cipta karya untuk Kabupaten/Kota

Bab 4. Profil Kabupaten/Kota

OUTLINE BARU

Bab 1. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Kedudukan RPIJM
- 1.4. Muatan RPIJM

Bab 2 Profil Kabupaten/Kota

- 2.1. Wilayah Administrasi
- 2.2. Potensi Wilayah kabupaten/Kota
- 2.3. Demografi dan Urbanisasi
- 2.4. Isu Strategis Sosial Ekonomi dan Lingkungan Berdasarkan RPJMD dan RTRW Kabupaten/Kota

3

Outline RPIJM

OUTLINE LAMA

Bab 5. Keterpaduan Strategi Pengembangan Kabupaten/Kota

Bab 6. Aspek Teknis Per Sektor

Bab 7. Keterpaduan Program Berdasarkan Entinitas

Bab 8. Aspek Lingkungan dan Sosial

OUTLINE BARU

Bab 3. Arahan Kebijakan dan Rencana Strategis Infrastruktur Bidang Cipta Karya

3.1 Arahan Kebijakan Pembangunan Bidang Cipta Karya dan Arahan Penataan Ruang

3.2 Rencana Strategis Infrastruktur Bidang Cipta Karya

Bab 4. Analisis Sosial Ekonomi dan Lingkungan

4.1 Analisis Sosial

4.2 Analisis Ekonomi

4.2 Analisis Lingkungan

3

Outline RPIJM

OUTLINE LAMA

Bab 9. Aspek Pembiayaan

Bab 10. Aspek Kelembagaan
Kabupaten/Kota

OUTLINE BARU

Bab 5. Kerangka Strategi Pembiayaan
Infrastruktur Bidang Cipta Karya

5.1. Potensi Pendanaan APBD

5.2. Potensi Pendanaan APBN

5.3. Alternatif Sumber Pendanaan

5.4. Strategi Peningkatan Investasi
Bidang Cipta Karya

Bab 6. Kerangka Kelembagaan dan Regulasi
Kabupaten/Kota

6.1. Kerangka Kelembagaan

6.2. Kerangka Regulasi

2

Outline RPIJM

OUTLINE LAMA

OUTLINE BARU

Bab 7. Rencana Pembangunan Infrastruktur Cipta Karya

7.1 Sektor Pengembangan Kawasan Permukiman

7.2 Sektor Penataan Bangunan dan Lingkungan

7.3 Sektor Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

7.4 Sektor Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman

Bab 8. Memorandum Program Jangka Menengah Bidang Cipta Karya

4

Simulasi Penyusunan Bab 1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Penjelasan mengenai latar belakang penyusunan RPIJM berdasarkan :

- Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Perpres No. 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019
- Permen PUPR No. 13/RPT/M/2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum

Penjelasan mengenai latar belakang kebijakan lokal di tingkat Kabupaten/ Kota yang terkait dengan pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya

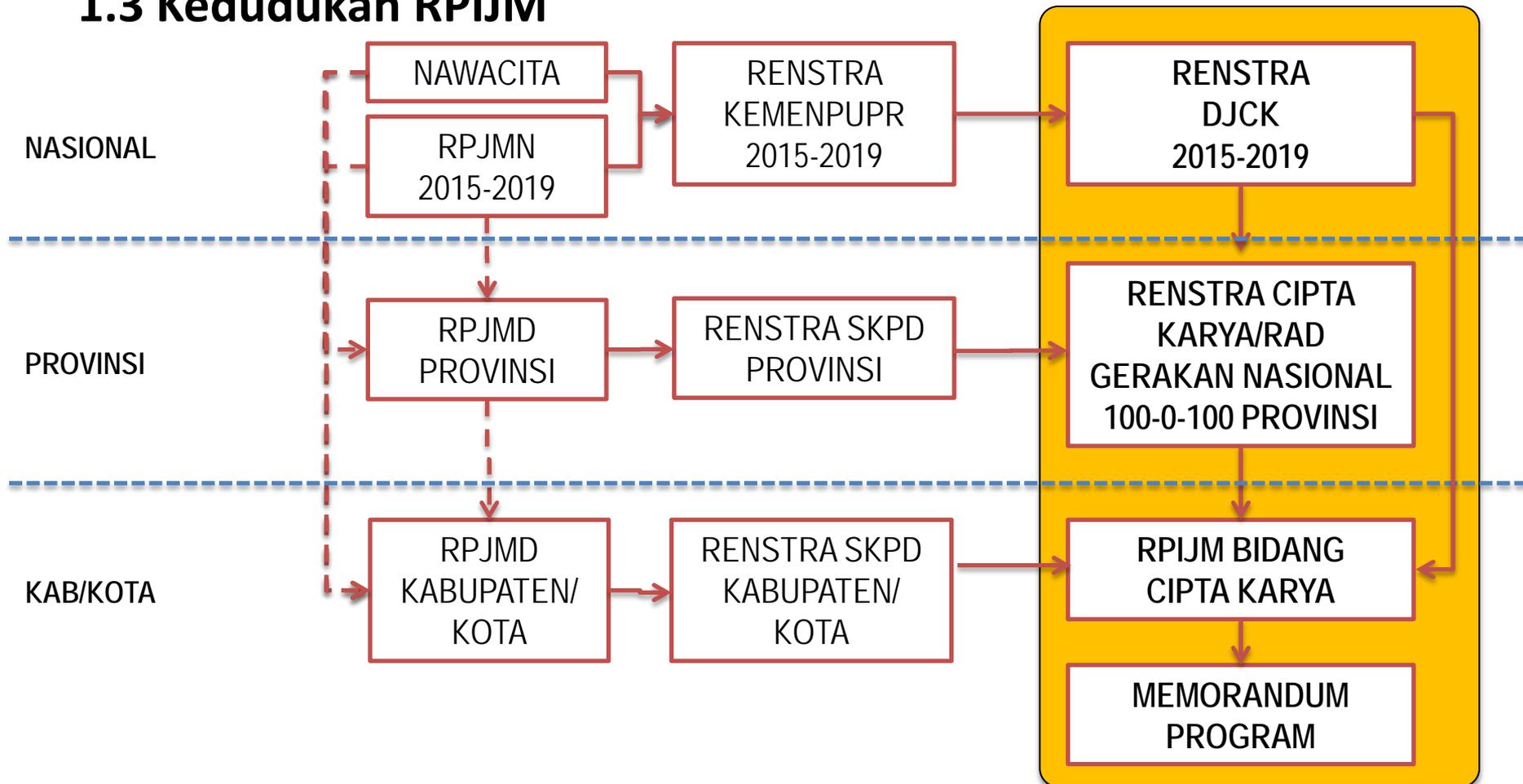
1.2 Maksud dan Tujuan

MAKSUD	TUJUAN
mewujudkan kemandirian kabupaten/kota dalam penyelenggaraan infrastruktur permukiman yang berkelanjutan, baik di perkotaan maupun perdesaan	sebagai dokumen acuan dalam perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya. RPIJM memuat rencana program dan investasi dalam jangka waktu lima tahun.

4

Simulasi Penyusunan Bab 1 Pendahuluan

1.3 Kedudukan RPIJM



4

Simulasi Penyusunan Bab 1 Pendahuluan

1.4 Muatan RPIJM

BAB	URAIAN
BAB 1 PENDAHULUAN	Penjelasan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan RPIJM, serta muatan RPIJM Bidang Cipta Karya
BAB 2 PROFIL KABUPATEN/KOTA	Membahas mengenai wilayah administrasi, potensi wilayah, demografi dan urbanisasi, serta isu strategis Kabupaten/Kota.
BAB 3 ARAHAN KEBIJAKAN DAN RENCANA STRATEGIS INFRASTRUKTUR BIDANG CIPTA KARYA	Arahan kebijakan pembangunan Bidang Cipta Karya dan rencana strategis infrastruktur Bidang Cipta Karya
BAB 4 ANALISIS SOSIAL, EKONOMI, DAN LINGKUNGAN	membahas tentang analisis sosial, ekonomi, dan lingkungan antara lain Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan analisis kemiskinan.
BAB 5 KERANGKA STRATEGI PENDANAAN INFRASTRUKTUR BIDANG CIPTA KARYA	membahas mengenai kebutuhan investasi, potensi pendanaan, dan alternatif pendanaan.

4

Simulasi Penyusunan Bab 1 Pendahuluan

1.4 Muatan RPIJM

BAB	URAIAN
BAB 6 KERANGKA KELEMBAGAAN DAN REGULASI KABUPATEN/KOTA	membahas mengenai kerangka kelembagaan dan kerangka regulasi yang ada di kabupaten/kota.
BAB 7 RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR CIPTA KARYA	membahas mengenai rencana program investasi infrastruktur Bidang Cipta Karya untuk masing-masing sektor, yaitu sektor Pengembangan Kawasan Permukiman, Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengembangan SPAM, dan Pengembangan PLP. Pada setiap sektor dijelaskan kondisi eksisting, analisis kebutuhan, serta usulan kebutuhan program dan pendanaan masing-masing sektor.
BAB 8 MEMORANDUM PROGRAM JANGKA MENENGAH BIDANG CIPTA KARYA	mengenai matriks program investasi RPIJM Kabupaten/Kota dan matriks keterpaduan program pada kawasan prioritas Kabupaten/Kota

5

Simulasi Penyusunan Bab 2 Profil Kabupaten/Kota

2.1 Wilayah Administrasi

Pembahasan mengenai wilayah administrasi antara lain terdiri dari:

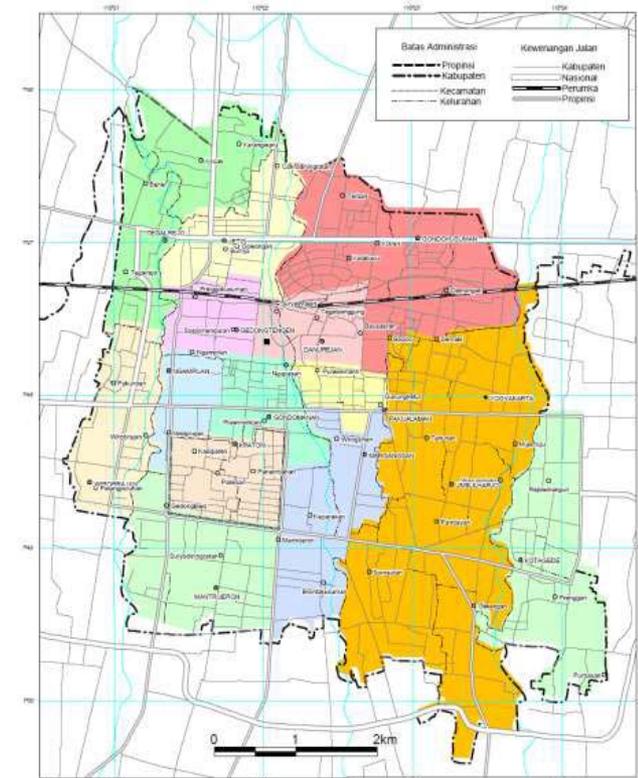
- Gambaran administrasi wilayah (meliputi: luas wilayah, batas wilayah, serta jumlah kecamatan dan kelurahan)
- Peta wilayah skala 1:50.000 untuk kabupaten
- Peta wilayah skala 1:25.000 untuk kota

Contoh :

Luas wilayah Kota Yogyakarta adalah 32,5 km² atau 1,02% dari luas Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah administratif Kota Yogyakarta terdiri dari 14 Kecamatan dan 48 Kelurahan. Batas wilayah administratif Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut

- Sebelah Utara : Kabupaten Sleman
- Sebelah Timur : Kabupaten Bantul dan Sleman
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bantul
- Sebelah Barat : Kabupaten Bantul dan Sleman

No.	Sub-district	Area (km ²)	Wards	Neighbour hood Level	Area % Regency
1	Mantrijeron	2.61	3	43	8.0%
2	Kraton	1.40	3	62	4.3%
3	Mergangsan	2.31	3	49	7.1%
4	Umbulharjo	8.12	7	53	25.0%
5	Kotagede	3.07	3	55	9.4%
6	Gondokusuman	3.99	5	54	12.3%
7	Danurejan	1.10	3	52	3.4%
8	Pakualaman	0.63	2	49	1.9%
9	Gondomanan	1.12	2	45	3.4%
10	Ngampilan	0.82	2	50	2.5%
11	Wirobrajan	1.76	3	64	5.4%
12	Gedongtengen	0.96	2	63	3.0%
13	Jetis	1.70	3	72	5.2%
14	Tegalrejo	2.91	4	58	9.0%
Total		32.50	45	769	



5

Simulasi Penyusunan Bab 2 Profil Kabupaten/Kota

2.2 Potensi Wilayah Kabupaten/Kota

Bagian ini berisikan mengenai potensi wilayah yang dimiliki oleh kabupaten/kota, antara lain potensi ekonomi kreatif, pariwisata, minyak dan gas, dan sebagainya, yang perlu didukung pembangunannya dengan infrastruktur permukiman.

Contoh :

Budaya sebagai aset utama kota Yogyakarta, terutama dengan pariwisata dan pendidikan. Potensi budaya dan karakter masyarakat Yogyakarta sangat mendukung. Telah ditetapkan 12 Kawasan Budaya, namun karakter terus berubah. Telah diinventarisasi setidaknya ada 129 aset budaya fisik di Kota Yogyakarta berupa kelompok bangunan, bangunan tunggal maupun komponen bangunan. Dalam pelestarian Kota Yogyakarta sebagai Kota Pusaka perlu didukung infrastruktur permukiman antara lain infrastruktur persampahan, infrastruktur air limbah permukiman, infrastruktur air minum, jalan lingkungan dan pedestrian, ruang terbuka hijau, penataan kawasan pusaka dsb. Di samping itu juga perlu kebijakan dan perencanaan penataan bangunan pusaka melalui penerapan Perda Bangunan Gedung dan penyusunan RTBL.

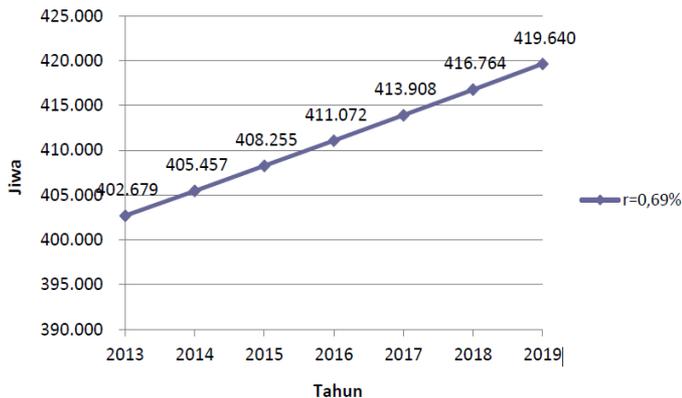
5

Simulasi Penyusunan Bab 2 Profil Kabupaten/Kota

2.3 Demografi dan Urbanisasi

Bagian ini berisikan pembahasan mengenai karakteristik penduduk kabupaten/kota berdasarkan:

- i. Jumlah penduduk dan KK keseluruhan
- ii. Jumlah penduduk miskin dan persebaran penduduk
- iii. Proyeksi pertumbuhan penduduk lima tahun ke depan
- iv. Jumlah penduduk perkotaan dan proyeksi urbanisasi



Proyeksi penduduk Kota Yogyakarta tahun 2013-2019

No	SUB-DISTRICT	Area (Km2)	TOTAL			DENSITY (Person/Km2)	
			Male	Female	Population		
1	Mantijeron	2.81	20,034	19,859	39,893	7,803	15.208
2	Kraton	1.4	16,348	15,836	32,184	7,381	22.989
3	Mergangsan	2.31	22,214	19,979	42,193	7,614	18.265
4	Umbulharjo	8.12	35,540	33,753	69,293	15,161	8.534
5	Kotagede	3.07	14,584	14,396	28,980	5,879	9.440
6	Gondokusuman	3.99	39,255	34,475	73,730	13,003	18.479
7	Danurejan	1.1	16,355	14,485	30,840	6,662	28.036
8	Pakualaman	0.63	7,204	7,558	14,762	2,789	23.432
9	Gondomanan	1.12	10,908	9,717	20,625	4,267	18.415
10	Ngampilan	0.82	11,578	11,611	23,189	4,881	28.279
11	Wirobarajan	1.76	15,351	15,182	30,533	6,746	17.348
12	Gedongtengen	0.96	13,524	13,374	26,898	5,500	28.019
13	Jetis	1.7	20,273	17,995	38,268	6,813	22.511
14	Tegalrejo	2.91	20,267	19,459	39,726	7,969	13.652
Total 2002		32.50	263,435	247,479	510,914	102,267	15.720
Total 2001		32.50	260,209	243,745	503,954	101,117	15.506
Total 2000		32.50	256,875	240,824	497,699	98,931	15.314

Source : Population Registration 2002, Statistics Office Yogyakarta City

Sebaran penduduk Kota Yogyakarta berdasarkan kecamatan tahun 2013

5

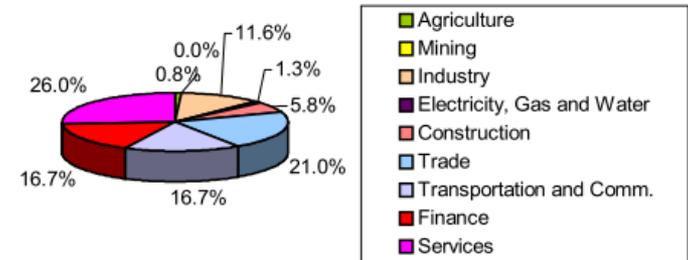
Simulasi Penyusunan Bab 2 Profil Kabupaten/Kota

2.4 Isu Strategis Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan

Bagian ini berisikan, antara lain:

- i. Data perkembangan PDRB dan potensi ekonomi
- ii. Data pendapatan per kapita dan proporsi penduduk miskin
- iii. Data kondisi lingkungan strategis (misal: topografi, geologi, klimatologi dll)
- iv. Data risiko bencana alam
- v. isu-isu strategis terkait pembangunan infrastruktur bidang cipta karya (antara lain capaian pelayanan dan kualitas)

GDP Distribution per Sector 2002



Agregat/Aggregates	2009	2010	2011	2012*	2013**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 PDRB/GRDP (juta Rp /million Rp)	20 064 257	21 044 042	22 131 774	23 308 558	24 567 476
2 Penyusutan/ Depreciation (jutaRp /million Rp)	1 160 709	1 251 308	1 325 024	1 399 463	1 480 076
3 Produk Domestik Regional Neto atas Dasar Harga Pasar/Net Regional Domestic Product at Market Price (jutaRp /million Rp)	18 903 548	19 792 734	20 806 750	21 909 095	23 087 400
4 Pajak Tak Langsung Neto/ Net Indirect Taxes (jutaRp /million Rp)	1 550 460	1 640 641	1 734 890	1 843 298	1 943 957
5 Produk Domestik Regional Neto atas Dasar Biaya Faktor/ Net Regional Domestic Product at Factor Cost (jutaRp /million Rp)	17 353 088	18 152 093	19 071 860	20 065 797	21 143 443
6 Penduduk Tengah Tahun*/ Mid Year Population (orang/persons)	3 426 637	3 467 500	3 510 000	3 552 500	3594 854
7 PDRB per Kapita/ GRDP per Capita (Rp)	5 855 379	6 068 938	6 305 349	6 561 170	6 915 546
8 Produk Domestik Regional Neto per Kapita/ Net Regional Domestic Product per Capita (Rp)	5 064 175	5 234 922	5 433 578	5 648 359	5 951 708
9. Laju Pertumbuhan/Growth (%)	4,43	4,88	5,17	5,32	5,40

- Yogyakarta berdekatan dengan gunung api aktif yaitu Merapi, dan dilalui 3 sungai yang membawa sedimentasi sehingga rentan terhadap bencana banjir.
- Permukaan tanah relatif datar dengan kemiringan 0-2%
- Sebagian besar peruntukan lahan untuk permukiman, sedangkan untuk pertanian hanya 5%
- Sektor Jasa dan perdagangan merupakan sektor utama ekonomi Kota Jogja.
- Pariwisata berbasis budaya menjadi andalan Kota Yogyakarta, didukung keberadaan bangunan historis, museum, kerajinan perak dan kulit, batik dll

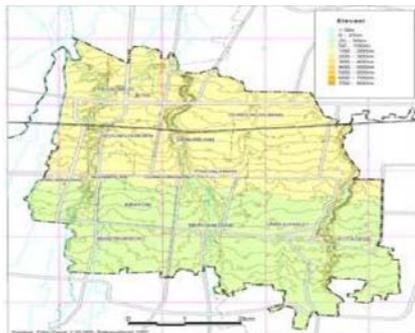
5

Simulasi Penyusunan Bab 2 Profil Kabupaten/Kota

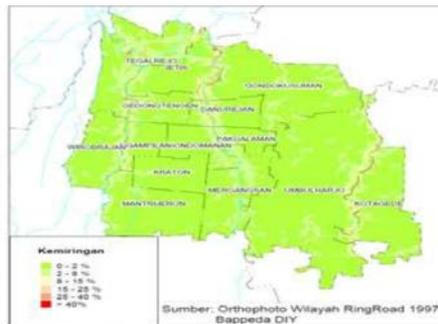
2.4 Isu Strategis Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan

Isu-isu strategis terkait pembangunan infrastruktur bidang cipta karya :

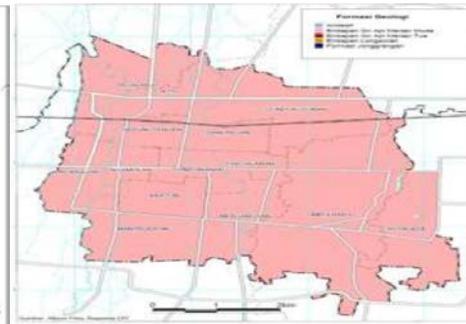
- Mengimplementasikan konsepsi pembangunan berkelanjutan serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
- Meminimalisir penyebab dan dampak bencana sekecil mungkin.
- Meningkatnya urbanisasi yang berimplikasi terhadap proporsi penduduk perkotaan yang bertambah, tingginya kemiskinan penduduk perkotaan, dan bertambahnya kawasan kumuh.
- Belum optimalnya pemanfaatan Infrastruktur Permukiman yang sudah dibangun.
- Perlunya kerjasama lintas sektor untuk mendukung sinergitas dalam pengembangan kawasan permukiman.
- Belum optimalnya kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia serta perangkat organisasi penyelenggara dalam memenuhi standar pelayanan minimal di bidang pembangunan perumahan dan permukiman



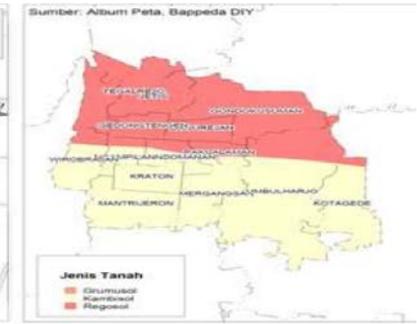
(a) Elevasi



(b) Kemiringan



(a) Geologi



(b) Jenis Tanah

6

Simulasi Penyusunan

Bab 3 Arahkan Kebijakan dan Rencana Strategis Infrastruktur Bidang Cipta Karya

3.1 Arahkan Pembangunan Bidang Cipta Karya dan Arahkan Penataan Ruang

Bagian ini berisikan tiga sub bagian, yaitu:

- 3.1.1 **Arahkan Pembangunan Bidang Cipta Karya**, berisikan arahan pembangunan berdasarkan Perpres 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 dan Renstra Ditjen Cipta Karya 2015-2019.

Contoh :

Arahkan RPJMN terhadap pembangunan bidang Cipta Karya

1. Tercapainya pengentasan **permukiman kumuh perkotaan menjadi 0%** melalui penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 hektar dan peningkatan keswadayaan masyarakat di 7.683 kelurahan.
2. Meningkatnya keamanan dan keselamatan bangunan gedung termasuk keserasiannya terhadap lingkungan melalui (i) **pembinaan dan pengawasan khususnya BGN; (ii) penyusunan NSPK dan penerapan penyelenggaraan bangunan hijau; dan (iii) menciptakan *building codes*.**
3. Tercapainya **akses air minum yang aman menjadi 100%** melalui penanganan tingkat regional, kabupaten/kota, kawasan dan lingkungan, baik di perkotaan maupun di perdesaan.
4. Meningkatnya akses penduduk terhadap **sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) menjadi 100 %** pada tingkat kebutuhan dasar melalui penanganan tingkat regional, kabupaten/kota, kawasan dan lingkungan, baik di perkotaan maupun di perdesaan.

6

Simulasi Penyusunan

Bab 3 Arah Kebijakan dan Rencana Strategis Infrastruktur Bidang Cipta Karya

3.1 Arah Pembangunan Bidang Cipta Karya dan Arah Penataan Ruang

3.1.2 **Arah Penataan Ruang**, antara lain berisikan arahan penetapan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Kawasan Strategis Nasional (KSN) pada kabupaten/kota sesuai dengan amanat PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).

Bagian ini juga berisikan arahan spasial untuk Bidang Cipta Karya berdasarkan RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota.

Penetapan Daerah DI Yogyakarta sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)	
Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	Yogyakarta
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	Bantul ; Sleman
Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)	-
Kawasan Strategis Nasional (KSN)	Kawasan Yogyakarta dan sekitarnya

6

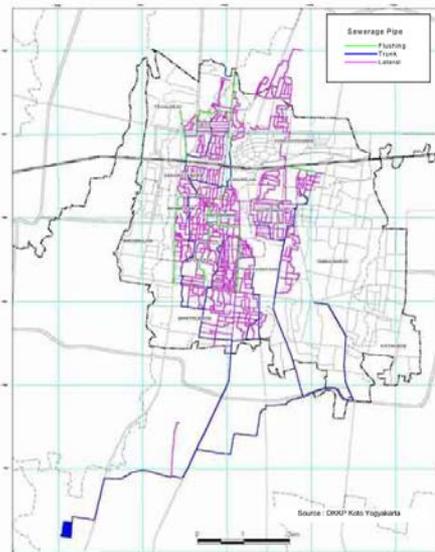
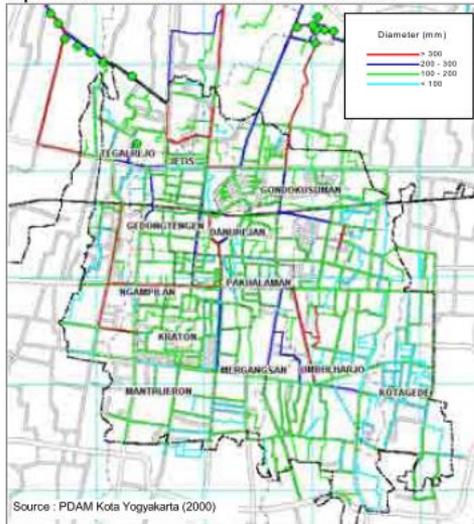
Simulasi Penyusunan

Bab 3 Arahan Kebijakan dan Rencana Strategis Infrastruktur Bidang Cipta Karya

3.1 Arahan Pembangunan Bidang Cipta Karya dan Arahan Penataan Ruang

3.1.2 **Arahan Penataan Ruang**, Bagian ini juga berisikan arahan spasial untuk Bidang Cipta Karya berdasarkan RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota.

Pipe Distribution Network of PDAM Tirtamarta



Amanat Perda No. 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta

1. Pengembangan struktur ruang kota sebagaimana dimaksudkan untuk pemeratakan pertumbuhan pembangunan diseluruh wilayah kota Yogyakarta yang meliputi :
 - a. kawasan pusat kota di wilayah Kecamatan Danurejan, Kecamatan Gedongtengen, dan Kecamatan Gondomanan;
 - b. kawasan wisata budaya dikembangkan di kecamatan kraton, kecamatan pakualaman dan Kecamatan Kotagede;
 - c. Kecamatan Umbulharjo merupakan kawasan prioritas yang harus dikembangkan dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain yang relatif sudah berkembang, baik di perkotaan maupun di perdesaan.

6

Simulasi Penyusunan

Bab 3 Arahan Kebijakan dan Rencana Strategis Infrastruktur Bidang Cipta Karya

3.1 Arahan Pembangunan Bidang Cipta Karya dan Arahan Penataan Ruang

3.1.4 Arahan Rencana Pembangunan Daerah, berisikan arahan pembangunan daerah sesuai dengan RPJMD Provinsi, RPJMD Kabupaten/Kota, dan Renstra SKPD terkait untuk pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya.

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016					
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Pekerjaan Umum																
Program Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	Meningkatnya kualitas penerangan jalan umum	90%	91%	4.069	92%	4.192	93%	4.317	94%	4.447	95%	4.580	95%	4.580	SKPD pengampu penerangan jalan umum	
Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan	77%	78%	14.075	79%	14.497	80%	14.932	81%	15.380	82%	15.842	82%	15.842	SKPD pengampu jalan dan jembatan	
Program Peningkatan dan Pemeliharaan Pengairan	Meningkatnya kualitas saluran pengairan	70%	70,5%	6.569	71%	6.766	71,5%	6.969	72%	7.178	72,5%	7.394	72,5%	7.394	SKPD pengampu pengairan	
Program Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase	Meningkatnya kualitas saluran drainase	87%	87%	4.094	87,09%	4.216	87,18%	4.343	87,27%	4.473	87,36%	4.607	87,36%	4.607	SKPD pengampu drainase	
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan SAL	Meningkatnya kinerja pengelolaan air limbah air limbah	12,5%	13,5%	7.315	14,5%	7.535	16%	7.761	17%	7.994	18%	8.233	18%	8.233	SKPD pengampu SAL	
Program Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan dari 80% menjadi 85%	80%	81%	23.229	82%	23.926	83%	24.644	84%	25.383	85%	26.144	85%	26.144	SKPD pengampu bangunan gedung pemerintah	
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya pemeliharaan kebersihan jalan yang ada di Kota Yogyakarta	267 penggal jalan	328 penggal jalan	8.442	389 penggal jalan	8.696	445 penggal jalan	8.956	500 penggal jalan	9.225	556 penggal jalan	9.502	556 penggal jalan	9.502	SKPD pengampu persampahan	
	Meningkatnya jumlah rumah tangga yang telah melakukan pemilahan sampah	17765 rumah	18700 rumah		20400 rumah		22100 rumah		23800 rumah		25500 rumah		25500 rumah			
	Peremajaan sarana dan prasarana pengangkutan sampah yang tidak layak	25 unit	5 unit		5 unit		5 unit		5 unit		5 unit		5 unit			
	Terkendalinya munculnya pembuangan sampah liar	60 titik	50 titik		40 titik		30 titik		20 titik		10 titik		10 titik			
	Meningkatnya jumlah wajib retribusi kebersihan baru	75000 WR	75100 WR		75350 WR		75600 WR		75850 WR		76100 WR		76100 WR			

6

Simulasi Penyusunan

Bab 3 Arah Kebijakan dan Rencana Strategis Infrastruktur Bidang Cipta Karya

3.2 Rencana Strategis Infrastruktur Bidang Cipta Karya

Bagian ini berisikan rangkuman dari rencana masing-masing sektor di lingkup Cipta Karya, baik untuk sektor pengembangan kawasan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, air minum, dan sanitasi.

3.2.1 Rencana Kawasan Permukiman (RKP), berisikan:

- i. Visi dan misi pengembangan kawasan permukiman
- ii. Rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman kabupaten/kota
- iii. Penetapan kawasan permukiman prioritas

3.2.2 Rencana Induk Penyediaan Air Minum (RISPAM), berisikan:

- i. Rencana sistem pelayanan
- ii. Rencana Pengembangan SPAM
- iii. Rencana penurunan kebocoran air minum

3.2.3 Strategi Sanitasi Kota (SSK), berisikan:

- i. Kerangka kerja pembangunan sanitasi
- ii. Tujuan, sasaran dan strategi sanitasi

3.2.4 Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), berisi:

- i. Progam bangunan dan lingkungan
- ii. Rencana umum dan panduan rancangan
- iii. Rencana investasi

6

Simulasi Penyusunan

Bab 3 Arahkan Kebijakan dan Rencana Strategis Infrastruktur Bidang Cipta Karya

3.2.5 **Matriks Rencana Strategis Infrastruktur Bidang Cipta Karya**, berisikan rangkuman dari uraian rencana masing-masing sektor ke dalam satu tabel.

Matriks Rencana Strategis Infrastruktur Bidang Cipta Karya

NO	PRODUK RENCANA	STATUS (ADA/TDK)	ARAHAN PEMBANGUNAN	INDIKASI PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	RKP				
2.	RISPAM				
3.	SSK				
4.	RTBL				

Langkah-langkah pengisian matriks Rencana Strategis Infrastruktur Bidang Cipta Karya:

1. Cek kelengkapan Dokumen Perencanaan Sektor di Kab/Kota dan masa berlaku dokumen tersebut;
2. List Kawasan Prioritas yang akan ditangani pada periode waktu tahun perencanaan yang direncanakan;
3. List program prioritas pada kawasan prioritas tersebut pada Indikasi Program;
4. Sandingkan dengan kondisi eksisting dan realitas kebutuhan saat ini berdasarkan data yang ada, apakah program tersebut masih relevan untuk diusulkan pada RPIJM;

7

Simulasi Penyusunan Bab 4 Analisis Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan

4.1 Analisis Sosial

Bagian ini berisikan analisis sosial sebagai dampak pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya, mulai pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pasca pelaksanaan. Beberapa hal penting untuk dibahas, antara lain:

- i. pengarusutamaan gender
- ii. identifikasi kebutuhan penanganan sosial pasca pelaksanaan pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya.

Contoh :

- Pembangunan kewilayahan dilaksanakan dengan mengakomodasi permasalahan dan kebutuhan pembangunan di tiap-tiap wilayah (kampung) dan didukung partisipasi seluruh warga kampung dengan menerapkan konsep pembangunan SEGORO AMARTO (Semangat Gotong Royong Agawe Majune Ngayogyakarta).
- Budaya merupakan aset utama Kota Yogyakarta, sehingga perlu dilestarikan dan dikembangkan sebagai sumber daya dalam pembangunan. Aset budaya mengalami tantangan terhadap perubahan visual, fungsi dan lingkungan, sehingga revitalisasi kawasan/bangunan bersejarah perlu diperhatikan dalam pembangunan kawasan permukiman. Saat ini terdapat 179 aset bangunan budaya.
- Peningkatan pemberdayaan masyarakat yang berafirmatif gender melalui pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan di seluruh kecamatan dengan keikutsertaan minimal 31%.

7

Simulasi Penyusunan Bab 4 Analisis Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan

4.2 Analisis Ekonomi

Bagian ini berisikan analisis ekonomi sebagai dampak pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya, mulai pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pasca pelaksanaan. Beberapa hal penting untuk dibahas, antara lain:

- i. Kemiskinan
- ii. analisis dampak pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya terhadap ekonomi lokal masyarakat

No	Indikator	2007	2008	2009	2010
1	Laju Inflasi (%)	7,99	9,88	2,93	7,38
2	Indeks Gini	0,2899	0,2798	0,2772	0,2717
3	Indeks ketimpangan Williamson dan pemerataan pendapatan (versi Bank Dunia)	NA	20,98	22,17	18,95
4	Penduduk diatas Garis Kemiskinan (%)	90,22	89,19	89,95	90,25
	- Jumlah Penduduk miskin (%)	9,78	10,81	10,05	9,75

Contoh :

- Proporsi kemiskinan di Kota Yogyakarta relatif tinggi walaupun telah menunjukkan penurunan dari 31 % (tahun 1999) menjadi 26 % pada tahun 2001. Masalah kemiskinan perkotaan terutama berkaitan dengan sumber daya manusia dan rendahnya akses terhadap sumber daya ekonomi. Persentase kemiskinan tertinggi adalah di Kotagede sebesar 40,8 %.
- Penataan kawasan/revitalisasi bangunan bersejarah dapat meningkatkan daya Tarik wisata sehingga mendorong ekonomi lokal.
- Masyarakat terlibat bersama dalam upaya penataan kawasan sebagai kawasan budaya maupun kawasan ekonomi misalnya dalam hal pengembangan kampung wisata.

7

Simulasi Penyusunan

Bab 4 Analisis Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan

4.3 Analisis Lingkungan

Bagian ini berisikan analisis lingkungan melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Contoh :

- Luasan Ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta pada tahun 2011 telah mencapai 32,46% dengan luas taman sebesar 63.305m², dimana 17,96% merupakan RTH publik dan 14,59% RTH privat (BLH Kota Yogyakarta, 2011). Meskipun sudah melebihi 30% seperti yang diamanatkan dalam undang-undang tetapi untuk RTH publik belum mencapai target. Dalam undang-undang disebutkan bahwa untuk RTH publik harus mencapai 20%.
- Kota Yogyakarta tidak lepas dari ancaman bencana baik yang bencana alam maupun non alam. Ancaman bencana yang sering dihadapi oleh penduduk Kota Yogyakarta adalah bencana kebakaran, angin puting beliung, dan lahar di sepanjang bantaran Kali Code. Ancaman bencana tersebut harus selalu disadari oleh masyarakat dan pemerintah Kota Yogyakarta sehingga upaya pengurangan resiko bencana selalu menjadi pertimbangan dalam setiap program pembangunan.
- upaya penjaminan kualitas air tanah di wilayah Kota Yogyakarta dapat dilakukan dengan cara pengendalian pencemaran air tanah. Pencemaran air tanah sebagian besar berasal dari bakteri e-coli dari tanki septik penduduk dan limbah cair domestik maupun industri. Upaya untuk mengurangi limbah yang terinfiltrasi langsung ke dalam air tanah merupakan isu strategis yang harus tetap diangkat sebagai program pembangunan Kota Yogyakarta, yaitu melalui peningkatan kapasitas IPAL komunal dan IPAL terpadu serta fasilitas water purifier.

7

Simulasi Penyusunan Bab 4 Analisis Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan

4.3 Analisis Lingkungan

Contoh Kriteria Penapisan KLHS Usulan Program/Kegiatan RPIJM bidang Cipta Karya

No.	Kriteria Penapisan	Penilaian	
		Uraian Pertimbangan	Kesimpulan
1.	Perubahan Iklim	Usulan kegiatan RPI2-JM merupakan suatu upaya untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim, seperti kegiatan penyediaan air minum sebagai upaya memberikan pelayanan air minum pada daerah sulit air bersih, kemudian kegiatan penyediaan	Tidak Signifikan
		drainase sebagai upaya mengurangi dampak meluasnya genangan akibat curah hujan yang tinggi.	
2.	Kerusakan, kemerosotan dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati	Usulan kegiatan RPI2-JM tidak bersinggungan dengan kawasan lindung yang berkaitan dengan lingkungan hayati.	Tidak Signifikan
3.	Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan	Usulan kegiatan RPI2-JM khususnya Sektor Pengembangan Permukiman salah satu kegiatannya bertujuan sebagai mitigasi bencana seperti pembuatan dinding penahan tanah pada kawasan longsor dan pembuatan jalur evakuasi bencana.	Tidak Signifikan

7

Simulasi Penyusunan Bab 4 Analisis Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan

Dalam mengidentifikasi analisis sosial, ekonomi dan lingkungan, dapat dimasukkan beberapa hal yang berhubungan dengan isu pembangunan berkelanjutan di Kabupaten/kota

Contoh Proses Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Bidang Cipta Karya

NO	PENGELOMPOKAN ISU-ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BIDANG CIPTA KARYA	PENJELASAN SINGKAT
(1)	(2)	(3)
4.1 Sosial		
1.	Pencemaran menyebabkan berkembangnya wabah penyakit	
4.2 Ekonomi		
1.	Kemiskinan berkorelasi dengan kerusakan lingkungan	Kerusakan lingkungan akan mengakibatkan kerusakan ekosistem lingkungan permukiman yang berdampak pada terjadinya bencana alam yang lebih besar
2.	Perkembangan ekonomi lokal dari pembangunan infrastruktur permukiman	Pembangunan infrastruktur dasar permukiman mendukung kelancaran kegiatan perekonomian, terutama terhadap pelaku yaitu manusia
4.3 Lingkungan		
1.	Kecukupan air baku untuk air minum	Pemulihan badan air agar dapat digunakan sebagai air baku untuk air minum
2.	Pencemaran lingkungan oleh infrastruktur yang tidak berfungsi maksimal	Penggunaan teknologi yang baik dan ramah lingkungan dalam pengelolaan air dan limbah rumah tangga
3.	Dampak kumuh terhadap kualitas lingkungan	Pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga yang tidak baik pada kawasan permukiman kumuh berdampak pada kerusakan lingkungan

Keterangan Pengisian :

(1) Nomor

(2), Pengelompokan isu pembangunan berkelanjutan (sosial, ekonomi dan lingkungan)

(3), Penjelasan singkat terkait isu pembangunan berkelanjutan (sosial, ekonomi dan lingkungan)

8

Simulasi Penyusunan

Bab 5 Kerangka Strategi Pembiayaan Infrastruktur Bidang Cipta Karya

5.1 Potensi Pendanaan APBD

Bagian ini berisikan potensi pendanaan pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya pada APBD Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Matriks Potensi Pendanaan APBD Kabupaten/Kota/Provinsi

SEKTOR	REALISASI					PROYEKSI				
	TAHUN -5	TAHUN -4	TAHUN 3	TAHUN -2	TAHUN -1	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pengembangan Kawasan Permukiman										
Penataan Bangunan dan Lingkungan										
Pengembangan SPAM										
Pengembangan PLP										
Total Belanja APBD Bidang Cipta Karya										
Total Belanja APBD										

Keterangan Pengisian :

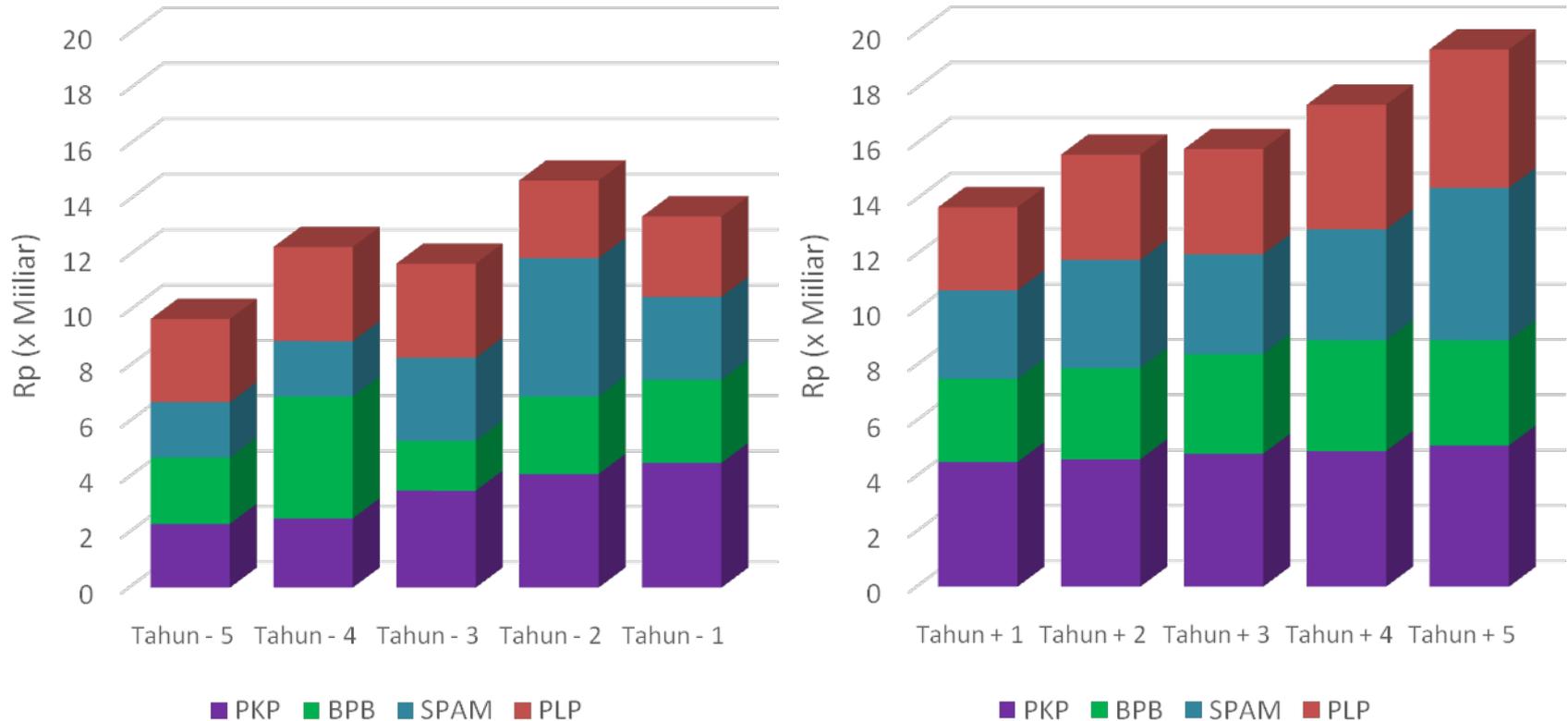
(1) Sektor Cipta Karya

(2), (3), (4), (5), (6) Tahun Realisasi kegiatan dalam jangka waktu lima tahun ke depan

(7), (8), (9), (10), (11) Tahun proyeksi kegiatan dalam jangka waktu lima tahun ke depan

8

Simulasi Penyusunan Bab 5 Kerangka Strategi Pembiayaan Infrastruktur Bidang Cipta Karya



Contoh Grafik Perkembangan Proporsi Pendapatan dan Belanja dalam APBD

8

Simulasi Penyusunan Bab 5 Kerangka Strategi Pembiayaan Infrastruktur Bidang Cipta Karya

5.2 Potensi Pendanaan APBN

Bagian ini berisikan potensi pendanaan pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya melalui APBN Direktorat Jenderal Cipta Karya di kabupaten/kota.

Matriks Potensi Pendanaan Bersumber APBN

SEKTOR	REALISASI				
	TAHUN -5	TAHUN -4	TAHUN 3	TAHUN -2	TAHUN -1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengembangan Kawasan Permukiman					
Penataan Bangunan Dan Lingkungan					
Pengembangan SPAM					
Pengembangan PLP					
DAK Air Minum					
DAK Sanitasi					
Total Alokasi APBN					

Keterangan Pengisian :

(1) Sektor Cipta Karya

(2), (3), (4), (5), (6) Tahun Realisasi kegiatan dalam jangka waktu lima tahun ke depan

8

Simulasi Penyusunan

Bab 5 Kerangka Strategi Pembiayaan Infrastruktur Bidang Cipta Karya

5.3 Alternatif Sumber Pendanaan

Bagian ini berisikan potensi alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya, di luar APBN dan APBD, antara lain melalui KPS, CSR, dan sebagainya. Untuk kegiatan yang layak secara finansial dapat dibangun dengan skema KPS, sedangkan kegiatan yang tidak layak secara finansial dapat diusulkan kepada swasta sebagai CSR.

Contoh Matriks Potensi Alternatif Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Bidang Cipta Karya melalui KPS

NAMA KEGIATAN	DESKRIPSI KEGIATAN	BIAYA KEGIATAN (RP)	KELAYAKAN FINANSIAL	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			IRR = ...	

Langkah-langkah pengisian matriks Potensi Alternatif Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur :

- 1) Identifikasi trend pendanaan KPS/CSR bidang pembangunan infrastruktur permukiman
- 2) Identifikasi perusahaan yang berpotensi menyalurkan dana CSR ke bidang pembangunan infrastruktur permukiman
- 3) Berkoordinasi dengan organisasi/perkumpulan di tingkat wilayah/regional terkait pendanaan KPS/CSR (seperti CFCD)
- 4) Penyiapan usulan prioritas yang akan didanai melalui CSR

8

Simulasi Penyusunan

Bab 5 Kerangka Strategi Pembiayaan Infrastruktur Bidang Cipta Karya

5.4 Strategi Peningkatan Investasi Bidang Cipta Karya

Satgas RPIJM daerah perlu merumuskan strategi peningkatan investasi pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya, yang meliputi:

- i. peningkatan DDUB oleh kabupaten/kota dan provinsi;
- ii. Peningkatan Penerimaan Daerah dan Efisiensi Penggunaan Anggaran;
- iii. Peningkatan Kinerja keuangan perusahaan daerah;
- iv. Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembiayaan pembangunan bidang Cipta Karya;
- v. Pendanaan untuk operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur permukiman yang sudah ada;
- vi. Pengembangan infrastruktur skala regional.

Contoh:

1. Strategi peningkatan penerimaan daerah dan efisiensi penggunaan anggaran
 - Pemberdayaan BUMD sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan daerah melalui reformasi visi BUMD, restrukturisasi BUMD, dan profitisasi BUMD.
 - Memperluas basis penerimaan pajak melalui identifikasi pembayar pajak baru/potensial serta meningkatkan efisiensi dan penekanan biaya pemungutan.
2. Strategi peningkatan pembiayaan infrastruktur
 - Melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan yang berpotensi didanai melalui skema KPS (Kerjasama Pemerintah dan Swasta).
 - Mengoptimalkan sumber pendanaan alternatif seperti pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN).

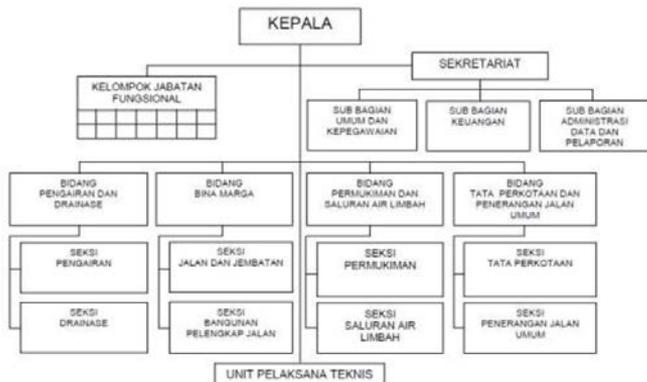
9

Simulasi Penyusunan Bab 6 Kerangka Kelembagaan dan Regulasi Kabupaten/Kota

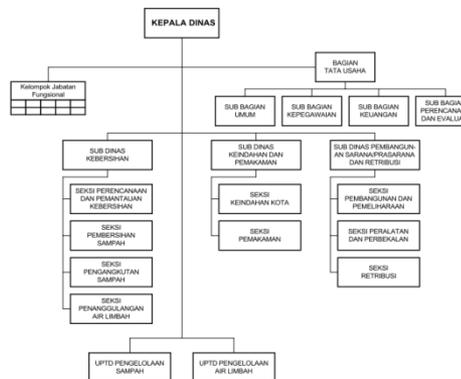
6.1 Kerangka Kelembagaan

Bagian ini berisikan kondisi kelembagaan di kabupaten/kota, antara lain mengenai organisasi, tata laksana, dan sumber daya manusia. Beberapa hal yang perlu ditampilkan antara lain:

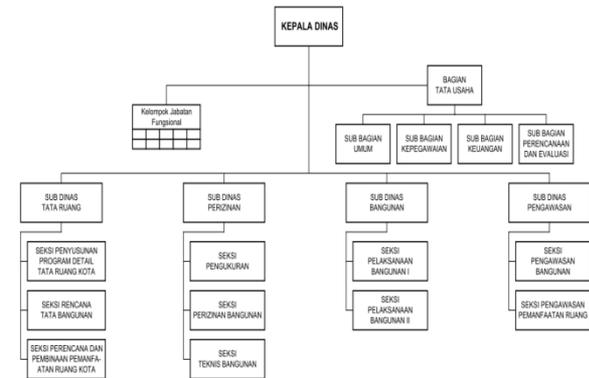
- Struktur organisasi, tugas, dan fungsi masing-masing unit yang terkait dengan pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya
- Potensi dan persoalan terkait dengan organisasi dan tata laksana pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya
- Analisis kebutuhan SDM dibandingkan dengan kondisi eksisting



Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta



Struktur Organisasi Dinas Kebersihan, Keindahan dan Pemakaman



Struktur Organisasi Dinas Tata Kota dan Bangunan

9

Simulasi Penyusunan Bab 6 Kerangka Kelembagaan dan Regulasi Kabupaten/Kota

6.2 Kerangka Regulasi

Bagian ini berisikan gambaran umum kerangka regulasi yang sudah ada dan regulasi yang diperlukan Daerah dalam pelaksanaan tugas, fungsi, serta kewenangannya pada pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya.

Matriks Kebutuhan Regulasi

NO	ARAH REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	SUBSTANSI ARAHAN REGULASI	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Langkah-langkah pengisian matriks Kerangka Regulasi :

1. Identifikasi Kerangka Regulasi yang telah disusun di Kab/Kota terkait Pembangunan Infrastruktur Permukiman (SK Bupati/Walikota, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/Walikota);
2. Latar Belakang penyusunan regulasi daerah;
3. Identifikasi unit penanggung jawab dan unit terkait di Kab/Kota (SKPD dan Stakeholder terkait pembangunan infrastruktur Permukiman)

10

Simulasi Penyusunan

Bab 7 Rencana Pembangunan Infrastruktur Cipta Karya

Bagian ini memaparkan **kondisi eksisting, sasaran program, serta usulan kebutuhan program dan pembiayaan** dalam rangka pencapaian gerakan nasional 100-0-100 yang terbagi menjadi 4 Sektor, yaitu:

7.1 Sektor Pengembangan Kawasan Permukiman

7.2 Sektor Penataan Bangunan dan Lingkungan

7.3 Sektor Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

7.4 Sektor Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman

10

Simulasi Penyusunan

Bab 7 Rencana Pembangunan Infrastruktur Cipta Karya

Kondisi Eksisting :

SEKTOR	DATA KONDISI EKSISTING
Sektor Pengembangan Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none">• Data kondisi eksisting kawasan kumuh, sebagai baseline perencanaan pembangunan menuju 100-0-100, dilengkapi dengan SK bupati/walikota• Kondisi eksisting permukiman perdesaan, permukiman nelayan, rawan bencana, perbatasan, dan pulau kecil• Potensi dan tantangan pengembangan kawasan permukiman• Pemetaan dan evaluasi program-program yang telah dilaksanakan di kabupaten/kota terkait dengan pembangunan kawasan permukiman, baik di perkotaan maupun perdesaan
Sektor Penataan Bangunan dan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none">• Data kondisi Perda Bangunan Gedung dan NSPK lainnya di kabupaten/kota (IMB, SLF, TA-BG, dan Pendataan BG)• Kondisi kota pusaka, kota hijau (RTH, Kebun Raya, Bangunan Gedung Hijau) dan kawasan strategis lainnya• Potensi dan tantangan Penataan Bangunan dan Lingkungan• Data lain yang terkait dengan penataan bangunan dan lingkungan

10

Simulasi Penyusunan

Bab 7 Rencana Pembangunan Infrastruktur Cipta Karya

Kondisi Eksisting :

SEKTOR	DATA KONDISI EKSISTING
Sektor Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	<ul style="list-style-type: none">• Data pelayanan air minum, baik perpipaan maupun non perpipaan• Luas cakupan pelayanan per kecamatan• Lokasi dan kapasitas air baku• Kinerja PDAM• Potensi dan tantangan Pengembangan SPAM• Serta data-data lain, baik kuantitatif maupun kualitatif
Sektor Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman	<ul style="list-style-type: none">• Data terkait pengelolaan air limbah eksisting (terpusat maupun setempat)• Kondisi eksisting pengelolaan persampahan di kabupaten/kota (TPA dan 3R)• Kondisi eksisting drainase permukiman• Tantangan dan permasalahan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman

10

Simulasi Penyusunan

Bab 7 Rencana Pembangunan Infrastruktur Cipta Karya

Sasaran Program :

Sasaran program **mengaitkan kondisi eksisting dengan target yang harus dicapai**. Terdapat arahan kebijakan yang menjadi acuan penetapan target pembangunan bidang Cipta Karya khususnya pada setiap sektor baik di tingkat Pusat maupun di tingkat kabupaten/kota

Contoh Matriks Sasaran Program Sektor Pengembangan Kawasan Permukiman

NO	URAIAN SASARAN PROGRAM	TOTAL LUAS KAWASAN	SASARAN PROGRAM					KET
			TAHUN I	TAHUN II	TAHUN III	TAHUN IV	TAHUN V	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	Kawasan Kumuh Perkotaan Ha Ha Ha Ha Ha Ha	
II	Kawasan Permukiman Perdesaan Ha Ha Ha Ha Ha Ha	
III	Kawasan Permukiman Khusus (Permukiman Nelayan, Perbatasan, Pulau Kecil, Rawan Bencana dsb) Ha Ha Ha Ha Ha Ha	

Keterangan pengisian :

(1) Nomor ; (2) Jenis kawasan permukiman ; 3) Total luas kawasan permukiman eksisting

(4), (5), (6), (7), (8) Sasaran luas penanganan kawasan permukiman dari tahun ke I hingga ke V

10

Simulasi Penyusunan

Bab 7 Rencana Pembangunan Infrastruktur Cipta Karya

Sasaran Program :

Contoh Matriks Sasaran Program Sektor Penataan Bangunan dan Lingkungan

NO	URAIAN SASARAN PROGRAM	SASARAN PENANGANAN	SASARAN PROGRAM					KET
			TAHUN I	TAHUN II	TAHUN III	TAHUN IV	TAHUN V	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	Penyelenggaraan Bangunan Gedung m ²						
II	Penataan Bangunan dan Lingkungan Strategis m ²						
III	Revitalisasi Kawasan Tematik Perkotaan Kawasan						
IV	Pengembangan RTH m ²						
V	Fasilitasi Ruang terbuka Publik/ Edukasi dan Partisipasi Masy. Kecamatan						
VI	Turbinwas BG % Bangunan ber IMB						

Keterangan pengisian :

(1) Nomor, (2) Jenis kegiatan PBL (3) Sasaran penangan 2015-2019, (4),(5),(6),(7),(8) Sasaran Program selama 5 tahun, (9) Keterangan

10

Simulasi Penyusunan

Bab 7 Rencana Pembangunan Infrastruktur Cipta Karya

Sasaran Program :

Contoh Matriks Analisis Kebutuhan Sektor Pengembangan SPAM

NO.	URAIAN SASARAN PROGRAM	KONDISI EKSTING	SASARAN PROGRAM				
			TAHUN I	TAHUN II	TAHUN III	TAHUN IV	TAHUN V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Sistem Perpipaan						
	Kebocoran (%)	... %					
	Cakupan Pelayanan Penduduk (%)	... %					
	Kapasitas Terpasang Lt/Detik					
	Idle Capacity	..., Lt/detik					
2.	Sistem Bukan Perpipaan						
	Cakupan Pelayanan Penduduk (%)	... %					
	Kapasitas Terpasang Lt/Detik					
3.	Kinerja PDAM						
	Aspek Keuangan (Skor penilaian BPPSPAM)	Skor:					
	Aspek Pelayanan (Skor penilaian BPPSPAM)	Skor:					
	Aspek Operasional(Skor penilaian BPPSPAM)	Skor:					
	Aspek SDM (Skor penilaian BPPSPAM)	Skor:					

Keterangan pengisian :

(1)Nomor, (2) Uraian, (3) Kondisi eksisting, (4),(5),(6),(7),(8) Rencana selama 5 tahun

10

Simulasi Penyusunan

Bab 7 Rencana Pembangunan Infrastruktur Cipta Karya

Sasaran Program :

Contoh Matriks Analisis Kebutuhan Sektor Pengembangan PLP

NO.	URAIAN SASARAN PROGRAM	KONDISI EKSTING	SASARAN PROGRAM				
			TAHUN I	TAHUN II	TAHUN III	TAHUN IV	TAHUN V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Sistem Pengolahan Air Limbah						
	Cakupan Pelayanan SPAL Terpusat	... %					
	Cakupan Pelayanan SPAL Setempat	... %					
	Kapasitas IPLTM3					
2.	Pengelolaan Persampahan						
	Cakupan Pelayanan Persampahan	... %					
	Jumlah sampah diolah dari sumber (3R)M3					
	Jumlah sampah diolah di akhir (TPA)M3					
3.	Drainase Permukiman						
	Luas genangan di permukiman	... Ha					

Keterangan pengisian :

(1) Nomor, (2) Sasaran Program, (3) Kondisi eksisting, (4),(5),(6),(7),(8) Sasaran program selama 5 tahun

10

Simulasi Penyusunan

Bab 7 Rencana Pembangunan Infrastruktur Cipta Karya

Usulan Kebutuhan Program :

Berisikan **rincian usulan hasil identifikasi kebutuhan program** untuk pencapaian sasaran program dari setiap sektor yang dijabarkan setiap tahunnya.

Contoh Matriks Usulan Kebutuhan Program Sektor Pengembangan Kawasan Permukiman

NO	KAWASAN PERMUKIMAN	LUAS KAWASAN	RENCANA PROGRAM					KET
			TAHUN I	TAHUN II	TAHUN III	TAHUN IV	TAHUN V	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	Kawasan Kumuh Perkotaan Ha						
	1. Kawasan Ha						
	2. Kawasan dst Ha						
II	Kawasan Permukiman Perdesaan Ha						
	1. Kawasan Ha						
	2. Kawasan dst Ha						
III	Kawasan Permukiman Khusus (Permukiman Nelayan, Perbatasan, Pulau Kecil, Rawan Bencana dsb) Ha						
	1. Kawasan Ha						
	2. Kawasan dst Ha						

Keterangan pengisian :

(1) Nomor, (2) Jenis kawasan permukiman, (3) Luas total kawasan permukiman eksisting, (4),(5),(6),(7),(8) Usulan Rencana kegiatan selama 5 tahun, (9) Keterangan

10

Simulasi Penyusunan

Bab 7 Rencana Pembangunan Infrastruktur Cipta Karya

Usulan Kebutuhan Program :

Contoh Matriks Usulan Kebutuhan Pembiayaan Sektor Pengembangan Kawasan Permukiman

NO	OUTPUT			LOKASI	TAHUN	VOL	SATUAN	SUMBER DANA					READINESS CRITERIA			
	INDIKATOROUTPUT							APBN	APBD PROV	APBD KAB /KOTA	KPS	CSR	DED/ FS	AMDAL/ UKL/UPL	LAHAN	PENGEL OLA
	RINCIAN															
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN																
1																
		1.a														
		1.b														
		...														
2																
		2.a														
		2.b														
		...														
3...																
	TOTAL															

((1) Nomor urut
 (2), (3), (4) output, indikator output, dan rincian kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Ditjen Cipta Karya untuk sector Pengembangan Permukiman
 (5) Lokasi kegiatan

(6) Tahun Kegiatan
 (7) Volume Kegiatan
 (8) Satuan
 (9), (10), (11), (12), (13) Sumber pembiayaan kegiatan yang bersumber dari matriks usulan program
 (14), (15), (16), (17) Kesiapan Readness Criteria

10

Simulasi Penyusunan

Bab 7 Rencana Pembangunan Infrastruktur Cipta Karya

Usulan Kebutuhan Program :

Contoh Matriks Usulan Kebutuhan Program Sektor Penataan Bangunan dan Lingkungan

NO	KEGIATAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	SATUAN	RENCANA PROGRAM					KET
			TAHUN I	TAHUN II	TAHUN III	TAHUN IV	TAHUN V	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	Penyelenggaraan Bangunan Gedung							
	1. Bangunan	m ²						
	2. Bangunan	m ²						
II	Penataan Bangunan dan Lingkungan Strategis							
	1. Kawasan	m ²						
	2. Kawasan	m ²						
III	Revitalisasi Kawasan Tematik Perkotaan							
	1. Kawasan	Kawasan						
	2. Kawasan	Kawasan						
IV	Pengembangan RTH							
	1. RTH	m ²						
	2. RTH	m ²						
V	Fasilitas Ruang terbuka Publik/ Edukasi dan Partisipasi Masy.							
	1. Kecamatan							
	2. Kecamatan							

Keterangan pengisian :

(1) Nomor, (2) Jenis keg. PBL (3) Satuan, (4),(5),(6),(7),(8) Usulan rencana program selama 5 tahun, (9) Keterangan

10

Simulasi Penyusunan

Bab 7 Rencana Pembangunan Infrastruktur Cipta Karya

Usulan Kebutuhan Program :

Contoh Matriks Usulan Kebutuhan Pembiayaan Sektor Penataan Bangunan dan Lingkungan

NO	OUTPUT			LOKASI	TAHUN	VOL	SATUAN	SUMBER DANA					RREADINESS CRITERIA			
	INDIKATOROUTPUT							APBN	APBD PROV	APBD KAB /KOTA	KPS	CSR	DED/ FS	AMDAL/ UKL/UPL	LAHAN	PENGEL OLA
	RINCIAN															
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAKSANAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN																
1																
		1.a														
		1.b														
		...														
2																
		2.a														
		2.b														
		...														
3...																
	TOTAL															

(1) Nomor urut

(2), (3), (4) output, indikator output, dan rincian kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Ditjen Cipta Karya untuk sektor Penataan Bangunan dan Lingkungan

(5) Lokasi kegiatan

(6) Tahun Kegiatan

(7) Volume Kegiatan

(8) Satuan

(9), (10), (11), (12), (13) Sumber pembiayaan kegiatan yang bersumber dari matriks usulan program

(14), (15), (16), (17) Kesiapan Readiness Criteria

10

Simulasi Penyusunan

Bab 7 Rencana Pembangunan Infrastruktur Cipta Karya

Usulan Kebutuhan Program :

Contoh Matriks Usulan Kebutuhan Program Sektor Pengembangan SPAM

NO	KEGIATAN PENGEMBANGAN SPAM	SATUAN	RENCANA PROGRAM					KET
			TAHUN I	TAHUN II	TAHUN III	TAHUN IV	TAHUN V	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	SPAM Regional							
	1. Wilayah	Lt/detik						
II	SPAM Perkotaan							
	1. Kecamatan	Lt/detik						
	2. Kecamatan	Lt/detik						
III	SPAM Perdesaan							
	1. Desa	Lt/detik						
	2. Desa	Lt/detik						
IV	SPAM Kawasan Khusus							
	1. Kawasan Kumuh	Lt/detik						
	2. Kawasan Nelayan	Lt/detik						
	3. Desa Rawan Air	Lt/detik						
V	Peningkatan Kinerja PDAM							

Keterangan pengisian :

(1) Nomor, (2) Kegiatan SPAM, (3) satuan liter/detik, (4),(5),(6),(7),(8) Usulan rencana program pengembangan SPAM selama 5 tahun, (9) Keterangan

10

Simulasi Penyusunan

Bab 7 Rencana Pembangunan Infrastruktur Cipta Karya

Usulan Kebutuhan Program :

Contoh Matriks Usulan Kebutuhan Pembiayaan Sektor Pengembangan SPAM

NO	OUTPUT			LOKASI	TAHUN	VOL	SATUAN	SUMBER DANA					RREADINESS CRITERIA			
	INDIKATOROUTPUT							APBN	APBD PROV	APBD KAB /KOTA	KPS	CSR	DED/ FS	AMDAL/ UKL/UPL	LAHAN	PENGEL OLA
	RINCIAN															
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN SPAM																
1																
		1.a														
		1.b														
		...														
2																
		2.a														
		2.b														
		...														
3...																
	TOTAL															

(1) Nomor urut
 (2), (3), (4) output, indikator output, dan rincian kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Ditjen Cipta Karya untuk sector Pengembangan SPAM
 (5) Lokasi kegiatan

(6) Tahun Kegiatan
 (7) Volume Kegiatan
 (8) Satuan
 (9), (10), (11), (12), (13) Sumber pembiayaan kegiatan yang bersumber dari matriks usulan program
 (14), (15), (16), (17) Kesiapan Readiness Criteria

10

Simulasi Penyusunan

Bab 7 Rencana Pembangunan Infrastruktur Cipta Karya

Usulan Kebutuhan Program :

Contoh Matriks Usulan Program Sektor Pengembangan PLP

NO.	Kegiatan Pengembangan PLP	Satuan	RENCANA PROGRAM				
			TAHUN I	TAHUN II	TAHUN III	TAHUN IV	TAHUN V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Sistem Pengolahan Air Limbah						
	SPAL Terpusat Skala Kota	KK/Kawasan					
	SPAL Terpusat Skala Kawasan	KK/Kawasan					
	SPAL Komunal ...	KK/Kawasan					
2.	Pengelolaan Persampahan						
	Infrastruktur Persampahan TPA	TPA					
	Infrastruktur Persampahan TPST/3R	Kawasan					
	Fasilitas Pengolah Sampah Sementara	Unit					
	Fasillitas Pewadahan, Pengumpul, dan Pengangkutan	Unit					
3.	Drainase Permukiman						
	Penanganan Drainase permukiman	Ha					

Keterangan pengisian :

(1) Nomor, (2) Kegiatan PPLP, (3) Satuan, (4),(5),(6),(7),(8) Usulan Rencana Program selama 5 tahun

10

Simulasi Penyusunan

Bab 7 Rencana Pembangunan Infrastruktur Cipta Karya

Usulan Kebutuhan Program :

Contoh Matriks Usulan Pembiayaan Sektor Pengembangan PLP

NO	OUTPUT			LOKASI	TAHUN	VOL	SATUAN	SUMBER DANA					RREADINESS CRITERIA			
	INDIKATOROUTPUT							APBN	APBD PROV	APBD KAB /KOTA	KPS	CSR	DED/ FS	AMDAL/ UKL/UPL	LAHAN	PENGEL OLA
	RINCIAN															
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PLP																
1																
		1.a														
		1.b														
		...														
2																
		2.a														
		2.b														
		...														
3...																
	TOTAL															

(1) Nomor urut
 (2), (3), (4) output, indikator output, dan rincian kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Ditjen Cipta Karya untuk sector Pengembangan PLP
 (5) Lokasi kegiatan

(6) Tahun Kegiatan
 (7) Volume Kegiatan
 (8) Satuan
 (9), (10), (11), (12), (13) Sumber pembiayaan kegiatan yang bersumber dari matriks usulan program
 (14), (15), (16), (17) Kesiapan Readiness Criteria

10

Simulasi Penyusunan

Bab 7 Rencana Pembangunan Infrastruktur Cipta Karya

Contoh Sektor Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman :

Kondisi Eksisting

No	Keterangan	Satuan	Kondisi Eksisting	
			2013/2014	
			Vol.	(%)
A	CAPAIAN CAKUPAN PELAYANAN			
1	Jumlah Penduduk	Jiwa	402.679	
2	Jumlah Penduduk Terlayani Sistem Terpusat	Jiwa	74.960	18,62%
3	Jumlah Penduduk Terlayani Sistem Komunal	Jiwa	9.762	2,42%
4	Jumlah Penduduk Terlayani Sistem Setempat	Jiwa	297.259	73,82%
	Jumlah Penduduk Terlayani Sanitasi Layak	Jiwa	381.981	94,86%

No	Keterangan	Satuan	Kondisi Eksisting	
			2013/2014	
			Vol.	(%)
A	CAPAIAN CAKUPAN PELAYANAN			
1	Jumlah Penduduk Perkotaan	Jiwa	402.679	
2	Proyeksi Potensi Timbulan Sampah Perkotaan	m3/hari	1.067	
3	Kapasitas Pengelolaan Sampah Perkotaan	m3/hari	1.053,53	98,73%
a	Kapasitas Pengurangan Sampah Melalui 3R	m3/hari	248,42	23,28%
b	Kapasitas Pelayanan Penampungan & Pengangkutan Sampah Menuju TPA	m3/hari	805,11	75,45%
4	Jumlah Penduduk Perkotaan Terlayani Pengelolaan Sampah	Jiwa	397.559	98,73%
a	Jumlah Penduduk Perkotaan Terlayani Pengurangan Sampah 3R	Jiwa	93.744	23,28%
b	Jumlah Penduduk Perkotaan Terlayani Penampungan & Pengangkutan Sampah Menuju TPA	Jiwa	303.815	75,45%

- Data terkait pengelolaan air limbah eksisting (terpusat maupun setempat)
- Kondisi eksisting pengelolaan persampahan di kabupaten/kota (TPA dan 3R)

10

Simulasi Penyusunan

Bab 7 Rencana Pembangunan Infrastruktur Cipta Karya

Contoh Sektor Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman :

Usulan Kebutuhan Program

Kegiatan	Detail Lokasi	Vol.	Sat.	Tahun	SUMBER PENDANAAN (RP. JUTA)							
					APBN		APBD PROV.	APBD KAB/KOTA	PERUSAHAAN DAERAH	SWASTA/MASYARAKAT	CSR	DAK
					RM	PHLN						
Peningkatan Infrastruktur Air Limbah Terpusat	Kota Yogyakarta	1	KWS	2015	40.000		2.000	1.325				
Peningkatan Infrastruktur Air Limbah Terpusat (Pengembangan SR)	Kota Yogyakarta	1	KWS	2016			2.000	1.600				
Peningkatan Infrastruktur Air Limbah Terpusat (Pengembangan SR)	Kota Yogyakarta	1	KWS	2017			2.000	1.900				
Peningkatan Infrastruktur Air Limbah Terpusat (Pengembangan SR)	Kota Yogyakarta	1	KWS	2018			2.000	2.300				
Peningkatan Infrastruktur Air Limbah Terpusat (Pengembangan SR)	Kota Yogyakarta	1	KWS	2019			2.000	2.300				
Pembangunan Drainase Perkotaan	Jalan Soka/ Jalan Kenari	1	Kt/Kab	2015	15.232			125				
Pembangunan Drainase Perkotaan	Jalan Babaran	1	Kt/Kab	2015	14.154			125				
Pembangunan Drainase Perkotaan	Jalan Kemasan Kotagede	1	Kt/Kab	2015	17.716			125				
Pembangunan Drainase Perkotaan	Perempatan Wirosaban	1	Kt/Kab	2015	1.000		1.000	125				
Pembangunan Drainase Perkotaan	Jl.C.Simanjuntak (gorong-gorong)/ Depan McD Jembatan Gondolayu	1	Kt/Kab	2015			1.000					
Pembangunan Drainase Perkotaan	Jl.Ronodigdayan (Lempuyangan)	1	Kt/Kab	2015			1.000					
Pembangunan Drainase Perkotaan	Jalan Menteri Supeno	1	Kt/Kab	2016	14.386		1.500	500				
Pembangunan Drainase Perkotaan	Jalan Mantjijeron	1	Kt/Kab	2017	2.380		1.500	500				
Pembangunan Drainase Perkotaan	Jalan Jogokaryan & Jalan Parwirotaman	1	Kt/Kab	2018	10.304		1.500	500				
Pembangunan Drainase Perkotaan	Jalan Panjaitan	1	Kt/Kab	2019	19.304		1.500	500				
Pengadaan Truck Tangki Tinja Kapasitas 4000 lt	Kota Yogyakarta	1	Kt/Kab	2015	400			50				
Infrastruktur Air Limbah Komunal	Kota Yogyakarta	2	KWS	2015	800							
Infrastruktur TPST 3R	Kota Yogyakarta	1	KWS	2015	484							
Infrastruktur TPST 3R (ITF)	Nitikan Kec. Umbulharjo	1	Unit	2015	1.000							
Sanimas	Kota Yogyakarta	2	Lok	2015	800			50				
Sanimas (DAK)	Kota Yogyakarta	4	Lokasi	2015				200			25	2.000
Sanimas (DAK)	Kota Yogyakarta	4	Lokasi	2016				200			25	2.000
Sanimas (DAK)	Kota Yogyakarta	4	Lokasi	2017				200			25	2.000
Sanimas (DAK)	Kota Yogyakarta	4	Lokasi	2018				200			25	2.000
Sanimas (DAK)	Kota Yogyakarta	4	Lokasi	2019				200			25	2.000
Pamsimas (DAK)	Kota Yogyakarta	4	Lokasi	2019				200			25	2.000

11

Simulasi Penyusunan Bab 8 Memorandum Program Jangka Menengah Bidang Cipta Karya

Berdasarkan tabel usulan program dan kegiatan pada setiap bab 7, maka dapat disusun sebuah tabel ringkas rencana program dan investasi bidang Cipta Karya. Rencana ini harus menjabarkan skenario pengembangan kabupaten/kota dan pengembangan sektor bidang Cipta Karya, usulan kebutuhan investasi yang disusun dengan berbasis kebutuhan, ataupun target pencapaian sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, mekanisme pendanaan atau pembiayaan, skala prioritas penanganannya, dan rencana pelaksanaan program investasi.

Matriks Memorandum Program Investasi Kabupaten/Kota

NO	SEKTOR	RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	VOL.	SATU AN	TAHUN	SUMBER PEMBIAYAAN (RP)							READINESS CRITERIA			DUKUNGAN TERHADAP KEBIJAKAN STRATEGIS	
							APBN	DAK	APBD PROV	APBD KAB/KOTA	BUMD	KPS	CSR	DED/ FS	AMDAL/ UKL/UPL	LAHAN		PENGELOMPOKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)

Keterangan Pengisian :

(1) Nomor urut ; (2) Sektor bidang Cipta Karya dan usulan program pembangunan ; (3) Rincian kegiatan pengembangan prasarana Cipta Karya ; (4) Lokasi kegiatan ; (5) Volume kegiatan ; (6) Satuan dari volume kegiatan ; (7) Tahun pelaksanaan kegiatan ; (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) Sumber pembiayaan ; (17), (18), (19), (20) Readiness Criteria ; (21) Dukungan terhadap kebijakan strategis (misal: WPS/RPJMN/RPJMD dsb. (lihat bab 3) ; (22) Tanda tangan ketua satgas RPIJM, (23) Tanda tangan ketua Bappeda

11

Simulasi Penyusunan Bab 8 Memorandum Program Jangka Menengah Bidang Cipta Karya

Contoh Memorandum Program Sektor PPLP dan AM

Sektor	Kegiatan	Detail Lokasi	Vol.	Sat.	Tahun	SUMBER PENDANAAN (RP. JUTA)							
						APBN		APBD PROV.	APBD KAB/KOTA	PERUSAHAAN DAERAH	SWASTA/MASYARA-KAT	CSR	DAK
						RM	PHLN						
PPLP	Peningkatan Infrastruktur Air Limbah Terpusat	Kota Yogyakarta	1	KWS	2015	40.000		2.000	1.325				
	Peningkatan Infrastruktur Air Limbah Terpusat (Pengembangan SR)	Kota Yogyakarta	1	KWS	2016			2.000	1.600				
	Peningkatan Infrastruktur Air Limbah Terpusat (Pengembangan SR)	Kota Yogyakarta	1	KWS	2017			2.000	1.900				
	Peningkatan Infrastruktur Air Limbah Terpusat (Pengembangan SR)	Kota Yogyakarta	1	KWS	2018			2.000	2.300				
	Peningkatan Infrastruktur Air Limbah Terpusat (Pengembangan SR)	Kota Yogyakarta	1	KWS	2019			2.000	2.300				
AM	Pengembangan SPAM Regional	Kartamantul	1	Kws	2015	185.000	-	7.533	16.000	16.000	50		
	Pengembangan SPAM Regional	Kartamantul	1	Kws	2016	95.000	-	23.000	16.000	16.000	50		
	Pengembangan SPAM Regional	Kartamantul	1	Kws	2017	2.000	-	-	18.000	18.000	50		
	Pengembangan SPAM Regional	Kartamantul	1	Kws	2018	2.000	-	-	18.000	18.000	50		
	Pengembangan SPAM Regional	Kartamantul	1	Kws	2019	2.000	-	-	12.000	12.000	50		

12

Draft Awal Penilaian Kelayakan Dokumen RPIJM

KRITERIA		No	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	Persentase Proporsi	SKOR = (Nilai X Presentase Proporsi)	
I. KELENGKAPAN DOKUMEN					5%		
A	LEGALISASI	1	Persetujuan Ketua Satgas RPIJM	100	0.05		5
		2	Persetujuan Kepala Bappeda	100	0.05		5
B	OUTLINE DOKUMEN	1	Pendahuluan	100	0.05		5
		2	Profil Kab/Kota	100	0.05		5
		3	Arahan Kebijakan dan Rencana Strategis Infrastruktur Bidang Cipta Karya	100	0.05		5
		4	Analisis Sosial, Ekonomi dan Lingkungan	100	0.05		5
		5	Kerangka Strategi Pembiayaan Infrastruktur Bidang Cipta Karya	100	0.05		5
		6	Kerangka Kelembagaan dan Regulasi Kab/Kota	100	0.05		5
		7	Rencana Pembangunan Infrastruktur Cipta Karya	100	0.05		5
		8	Memorandum Program Jangka Menengah Bidang Cipta Karya	100	0.05		5
						Skor Rata-Rata	5

Draft Awal Penilaian Kelayakan Dokumen RPIJM

II. PROFIL KABUPATEN/KOTA					5%		
C	PROFIL KABUPATEN/KOTA	1	Wilayah Administrasi	100	0.05		5
		2	Potensi Wilayah Kab/Kota	100	0.05		5
		3	Demografi dan Urbanisasi	100	0.05		5
		4	Isu Strategis Sosial Ekonomi dan Lingkungan Berdasarkan RPJMD dan RTRW Kab/Kota	100	0.05		5
						Skor Rata-Rata	5
III. ARAHAN KEBIJAKAN DAN RENCANA STRATEGIS INFRASTRUKTUR BIDANG CIPTA KARYA					5%		
D	ARAHAN PEMBANGUNAN BIDANG CIPTA KARYA DAN ARAHAN PENATAAN RUANG	1	Arahan Pembangunan Nasional Terkait Bidang Cipta Karya (RPJMN dan Renstra Ditjen Cipta Karya) di Pusat dan Provinsi	100	0.05		5
		2	Arahan Penataan Ruang	100	0.05		5
		3	Arahan Wilayah Pengembangan Strategis (PKN, PKSN, KSN, RTRWN)	100	0.05		5
		4	Arahan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD Provinsi dan RPJMD Kab/Kota)	100	0.05		5
E	RENCANA STRATEGIS INFRASTRUKTUR BIDANG CIPTA KARYA	1	Rencana Kaw asan Permukiman (RKP)	100	0.05		5
		2	Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)	100	0.05		5
		3	Strategi Sanitasi Kota (SSK)	100	0.05		5
		4	Rencana tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)	100	0.05		5
		5	Matriks Rencana Strategis Infrastruktur Bidang Cipta Karya	100	0.05		5
						Skor Rata-Rata	5

Draft Awal Penilaian Kelayakan Dokumen RPIJM

IV. KELAYAKAN ANALISIS EKONOMI ,SOSIAL DAN LINGKUNGAN					10%	
F	Kelayakan Analisis Ekonomi	1	Pengarusutamaan Gender	100	0.1	10
		2	Kebutuhan Penanganan Sosial Pasca Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang Cipta Karya.	100	0.1	10
G	Kelayakan Analisis Sosial	3	Kemiskinan	100	0.1	10
		4	analisis dampak pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya terhadap ekonomi lokal masyarakat	100	0.1	10
H	Kelayakan Analisis Lingkungan	5	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	100	0.1	10
						Skor Rata-Rata 10
V. KERANGKA STRATEGI PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR BIDANG CIPTA KARYA DALAM MENCAPAI 100-0-100					10%	
I	Kerangka Strategi Pembiayaan Infrastruktur Bidang Cipta Karya dalam Mencapai 100-0-100	1	Potensi Pendaanaan APBD Kabupaten/Kota	100	0.1	10
		2	Potensi Pendaanaan APBN	100	0.1	10
		3	Alternatif Sumber Pendanaan	100	0.1	10
		4	Strategi peningkatan Investasi bidang Cipta Karya untuk Mencapai 100-0-100	100	0.1	10
						Skor Rata-Rata 10

Draft Awal Penilaian Kelayakan Dokumen RPIJM

VI. KERANGKA KELEMBAGAN DAN REGULASI				10%		
J	ASPEK KELEMBAGAAN KAB/KOTA DALAM MENCAPAI 100-0-100	1	Struktur organisasi, tugas, dan fungsi masing-masing unit yang terkait dengan pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya	100	0.1	10
		2	Potensi dan persoalan terkait dengan organisasi dan tata laksana pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya	100	0.1	10
		3	Analisis kebutuhan SDM dibandingkan dengan kondisi eksisting	100	0.1	10
		4	Rencana penyusunan kelembagaan dalam mencapai sasaran strategis 100-0-100			
	ASPEK REGULASI KAB/KOTA DALAM MENCAPAI 100-0-100	1	Gambaran umum kerangka regulasi yang sudah ada dan regulasi yang diperlukan Daerah dalam pelaksanaan tugas, fungsi, serta kewenangannya pada pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya	100	0.1	10
		2	Rencana penyusunan regulasi dalam mencapai sasaran strategis 100-0-100	100	0.1	10
						Skor Rata-Rata 10

Draft Awal Penilaian Kelayakan Dokumen RPIJM

VII.KELAYAKAN PROGRAM					40%		
K	RENCANA PROGRAM INVESTASI SEKTOR PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1	Isu Strategis, Kondisi Eksisting, Permasalahan, dan Tantangan	100	0.4		40
		2	Analisis Kebutuhan Pengembangan Permukiman	100	0.4		40
		3	Kesiapan Daerah terhadap Kriteria Kesiapan (Readiness Criteria) Sektor Pengembangan Permukiman	100	0.4		40
		4	Usulan Kebutuhan Program dan Kegiatan	100	0.4		40
H	RENCANA PROGRAM INVESTASI SEKTOR PBL	1	Isu Strategis, Kondisi Eksisting, Permasalahan, dan Tantangan	100	0.4		40
		2	Analisis Kebutuhan Sektor PBL	100	0.4		40
		3	Kesiapan Daerah terhadap Kriteria Kesiapan (Readiness Criteria) Sektor Penataan Bangunan dan Lingkungan	100	0.4		40
		4	Usulan Kebutuhan Program dan Kegiatan	100	0.4		40
I	RENCANA PROGRAM INVESTASI SEKTOR PPLP	1	Isu Strategis, Kondisi Eksisting, Permasalahan, dan Tantangan (Air Limbah, Persampahan, Drainase)	100	0.4		40
		2	Analisis Kebutuhan Sektor Pengembangan PLP (Air Limbah, Persampahan, Drainase)	100	0.4		40
		3	Kesiapan Daerah terhadap Kriteria Kesiapan (Readiness Criteria) Sektor Pengembangan PLP (Air Limbah, Persampahan, Drainase)	100	0.4		40
		4	Usulan Kebutuhan Program dan Kegiatan Sektor Pengembangan PLP (Air Limbah, Persampahan, Drainase)	100	0.4		40
J	RENCANA PROGRAM INVESTASI SEKTOR AIR MINUM	1	Isu Strategis, Kondisi Eksisting, Permasalahan, dan Tantangan	100	0.4		40
		2	Analisis Kebutuhan Sektor Air Minum	100	0.4		40
		3	Kesiapan Daerah terhadap Kriteria Kesiapan (Readiness Criteria) Sektor Air Minum	100	0.4		40
		4	Usulan Kebutuhan Program dan Kegiatan	100	0.4		40
					Skor Rata-Rata		40

Draft Awal Penilaian Kelayakan Dokumen RPIJM

VIII.KELAYAKAN MEMORANDUM PROGRAM BIDANG CIPTA KARYA					15	
K	MEMORANDUM PROGRAM	1	Keterpaduan Program Berdasarkan Kegiatan Sektor, Sumber pendanaan, Readiness Criteria dan Dukungan Terhadap Kebijakan Strategis	100	0.15	15
						Skor Rata-Rata 15
						Total Skor 100

Keterangan:

1. Skala Penilaian berkisar 0 S/d 100
2. Total Skor = Penjumlahan dari Skor Rata-Rata
3. Terdapat 3 Jenis Penilaian Kelayakan RPIJM. yang dinilai berdasarkan Total Skor
 - a. Total Skor = 0-40 (Kurang)
 - b. Total Skor = 41-60 (Cukup)
 - c. Total Skor = 61-100 (Baik)